

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala (1996). *Aspek-aspek Hukum Pidana Internasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adolf, Huala. (2002). *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Afrianto, Eddy. (1996). *Kamus Istilah Perikanan*. Kanisius Bandung.
- Anwar, Chairul. (1989), *Hukum Internasional-Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Jakarta, Djambatan. hlm. 6.
- Anwar, Chairul. (1995). *Zona Ekonomi Eksklusif di dalam Hukum Internasional Dilengkapi dengan Analisis Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Asia Pasifik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ariadno, Melda, Kamil. (2007) *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*. Diadit Media. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Baikoeni, Efri, Yoni. (2014). *Patriot Negara Kepulauan*. Pandu Aksara, Jakarta.
- Dellyana, Shant (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Djalal, Hasjim. (1979). *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*. Binacipta. Bandung.
- Ghufran, M. (2015). *Pengelolaan Perikanan Indonesia*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hilmy, Umu. (2000). *Metodologi Penelitian dari Konsep Ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Kurnia, Putra, Mahendra. (2011). *Hukum Kewilayahan Indonesia*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana Media Grup. Jakarta.

- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metode Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muchjidin, Atje Misbach. (1993). *Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*. Bandung.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Patriana, Wayan. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Mandar Maju. Bandung.
- Rokhimin. (1996). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Cetakan Pertama. Jakarta.
- Santoso, Mas Achmad. (2016). *Alam Pun Butuh Hukum dan Keadilan*. Prima Pustaka. Jakarta
- Supriadi., Alimudin. (2011). *Hukum Perikanan di Indonesia*. Sinar Grafika. Palu.
- Subagyo, Joko. (2005). *Hukum Laut Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sodik, Mohamad Dikdik. (2014). *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Edisi Revisi. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri, (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9. Rajawali Press Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soedjono., Abdurahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wijayanti, Asri., Achmad, Lilik Sofyan. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. CV Lubuk Agung. Bandung.

**B. Jurnal, Artikel, Makalah, Majalah, Koran, Sumber Internet, dan Sumber lainnya**

- Ambari,M. (2017). “Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak...”, (diakses pada 25 September 2018) available from url: <http://www.mongabay.co.id/2017/08/18/dikukuhkan-di-new-york-jumlah-pulau-indonesia-kini-sebanyak/>.
- Anonim. (2015). “Maritim Indonesia Kemewahan Yang Luar Biasa”, (diakses pada 25 September 2018) available from url: <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>.
- Ariadno, Melda Kamil. (2017). “Law Enforcement on Illegal Fishing by Foreign Fishing Vessels Within Indonesia’s Exclusive Economic Zone”, Makalah dalam FGD Penegakan Hukum Pada Penangkapan Illegal KIA di ZEEI , di Universitas Indonesia, Depok, Kamis, 24 Oktober 2017.
- Bappeda Kepulauan Riau, <http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/201-sektor-perikanan>, diakses pada 25 Januari 2019.
- Bram, Deni. (2011). “Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional”, *Jurnal Hukum* No. 2, Vol. 18, April 2011, hlm. 193-211.
- Connely, Aaron L. (2017) “Indonesia di Laut Cina Selatan:Berjalan Sendiri”, *Loewy Institute For International Policy*, April 2017, hlm. 1-28.
- Djalal, Hasjim. (2017). *IUU Fishing di Wilayah Kedaulatan Indonesia dan di Laut Bebas*, Pointer disajikan dalam Rakornas Satgas 115. Jakarta, 12-14 Juli 2017.
- Handoko, Wignyo. (2004). “Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan”, *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional – Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Haryanto. (2017).”Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional”, *Jurnal Law Reform*. Vol. 3 No. 1, hlm. 71-85.
- Kepala Bakamla. (2017). *Penegakan Hukum pada Penangkapan Ikan Illegal oleh Kapal Asing di ZEEI*. Makalah disajikan dalam FGD Universitas Indonesia, 24 Oktober 2017.
- Kartawijaya, Suharyono. (2015) “Pemanfaatan Hak Lintas Kapal Asing di Perairan Indonesia dan Penegakan Hukumnya”, *Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 3, hlm. 300-463

Monintja, Daniel R. (2005). “Suatu Tanggapan Terhadap Rencana Aksi Internasional untuk Pencegahan, penghambatan dan Penghapusan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Melanggar Hukum, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur”. *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2 Nomor 3, hlm. 655-664.

Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. (2018) “KKP Ancam Jerat Perusahaan dalam Kasus Illegal Fishing”, (diakses pada 26 Januari 2019) from url <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/21/200200426/kkp-ancam-jerat-perusahaan-dalam-kasus-illegal-fishing>.

Shidarta, “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Bidang Perikanan”, (diakses pada 26 Januari) from url <http://business-law.binus.ac.id/2017/08/10/korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-bidang-perikanan/>.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

*Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.50/Men/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (IUU Fishing)* Tahun 2012-2016.